

**PENGARUH KEJELASAN TUJUAN DAN DUKUNGAN ATASAN  
TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH**  
*(Studi Empiris pada Dinas di Pemerintah Kota Padang)*

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Strata  
Satu (S1)*



**OLEH:**

**CYNTIA CAROLINA**

**2009/98616**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2013**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

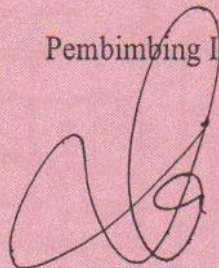
### PENGARUH KEJELASAN TUJUAN DAN DUKUNGAN ATASAN TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH ( Studi Empiris pada Dinas di Pemerintah Kota Padang)

Nama : Cyntia Carolina  
NIM/BP : 98616/2009  
Program studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2013

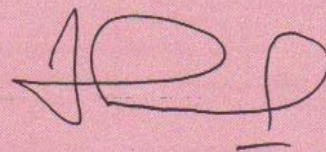
Disetujui oleh:

Pembimbing I



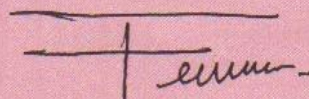
Deviani, SE, Ak, M.Si  
NIP. 19690610 199802 2 001

Pembimbing II



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19771123 200312 1 003

Mengetahui  
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

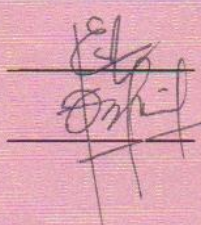
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

### **PENGARUH KEJELASAN TUJUAN DAN DUKUNGAN ATASAN TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH ( Studi Empiris pada Dinas di Pemerintah Kota Padang)**

Nama : Cyntia Carolina  
NIM/BP : 98616/2009  
Program studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2013

Tim Penguji

|               | Nama                          | Tanda Tangan                                                                          |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua      | : Deviani, SE, Ak, M.Si       |  |
| 2. Sekretaris | : Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak |  |
| 3. Anggota    | : Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak  |                                                                                       |
| 4. Anggota    | : Halmawati, SE, M.Si         |                                                                                       |

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Cyntia Carolina**  
Nim/Thn. Masuk : 98616/2009  
Tempat/Tgl Lahir : Kayu Aro, 9 Agustus 1992  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jln. Polonia No.17, Air Tawar Timur - Padang  
No. Hp/Telepon : 085266364011  
Judul Skripsi : Pengaruh Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan Terhadap  
Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi  
Empiris Pada Dinas di Pemerintah Kota Padang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di PerguruanTinggi.

Padang, Agustus 2013

Yang Menyatakan



**Cyntia Carolina**  
**NIM: 98616/2009**

## ABSTRAK

**Cyntia Carolina (98616). Pengaruh Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Pada Dinas di Pemerintah Kota Padang).**

**Pembimbing : 1. Deviani, SE, Ak. M.Si**  
**2. Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Pengaruh Kejelasan Tujuan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas di Pemerintah Kota Padang (2) Pengaruh Dukungan Atasan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas di Pemerintah Kota Padang. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja dibagian keuangan pada Dinas di Pemerintah Kota Padang. Sedangkan sampel penelitian ini ditentukan dengan metode *total sampling*, dengan karakteristik responden adalah: (1) Kepala sub bagian keuangan (2) Bendahara Pengeluaran (3) Pembantu Bendahara (4) Bagian verifikasi dan (5) Pemegang Barang. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Untuk pengujian hipotesis menggunakan uji *t* statistik dengan tingkat  $\alpha$  sebesar 5%.

Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Kejelasan tujuan berpengaruh signifikan positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dengan nilai signifikansi  $0,003 < \alpha 0,05$ . 2) Dukungan atasan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dengan nilai signifikansi  $0,577 > \alpha 0,05$ . Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi Peneliti selanjutnya untuk menambah sampel dengan memperluas tempat dan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan (Studi Empiris pada Dinas di Pemerintah Kota Padang)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Deviani, SE, Ak, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Henri Agustin, SE, Ak, M.Sc selaku pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan dan waktu bimbingan dalam mewujudkan karya skripsi ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Yunia Wardi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak / Ibu Pembantu Dekan.
2. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua Prodi dan Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Prodi Akuntansi
3. Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak dan Ibu Halmawati, SE, M.Si selaku penguji, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
4. Bapak-bapak Ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater ini.
5. Orang tua tercinta, Ayahanda Yent Sosiadhy dan Ibunda Imas Yuniar, kakak Guntur Gumilang, SP serta keluarga besar yang selalu memberikan perhatian, do'a, kasih sayang, dorongan dan pengorbanan yang tidak ada putus-putusnya kepada ananda hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini, .

6. Teman-teman yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu atas dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan dimasa yang akan datang.

Padang, Agustus 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                        | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                   | i       |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                            | ii      |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                | iv      |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                             | vi      |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                              | vii     |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                                           | viii    |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                                              |         |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                         | 1       |
| B. Perumusan Masalah.....                                              | 10      |
| C. Tujuan Penelitian.....                                              | 11      |
| D. Manfaat Penelitian.....                                             | 11      |
| <b>BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN<br/>    HIPOTESIS</b> |         |
| A. Kajian Teori .....                                                  | 13      |
| 1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....                               | 13      |
| 2. Kejelasan Tujuan.....                                               | 35      |
| 3. Dukungan Atasan.....                                                | 37      |
| B. Penelitian yang Relevan.....                                        | 40      |
| C. Hubungan Antar Variabel .....                                       | 42      |
| D. Kerangka Konseptual.....                                            | 44      |
| E. Hipotesis.....                                                      | 45      |

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian.....               | 46 |
| B. Populasi dan Sampel .....           | 46 |
| C. Jenis Data dan Sumber Data.....     | 48 |
| D. Metode Pengumpulan Data.....        | 49 |
| E. Variabel Penelitian.....            | 49 |
| F. Instrumen Penelitian.....           | 50 |
| G. Uji Validitas dan Reliabilitas..... | 50 |
| H. Uji Asumsi Klasik.....              | 53 |
| I. Teknik Analisis Data.....           | 54 |
| J. Definisi Operasional.....           | 58 |

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum.....                  | 60 |
| B. Demografi Responden .....           | 61 |
| C. Deskripsi Variabel Penelitian ..... | 63 |
| D. Statistik Deskriptif.....           | 67 |
| E. Uji Validitas dan Reliabilitas..... | 68 |
| F. Uji Asumsi Klasik .....             | 70 |
| G. Uji Model.....                      | 73 |
| H. Pembahasan .....                    | 78 |

### **BAB V. SIMPULAN DAN SARAN**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A. Simpulan .....                | 84 |
| B. Keterbatasan Penelitian ..... | 84 |
| C. Saran .....                   | 84 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar                       | Halaman |
|------------------------------|---------|
| 1. Kerangka Konseptual ..... | 44      |

## DAFTAR TABEL

| Tabel                                                                      | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Daftar Nama Dinas Pemerintah Kota Padang .....                          | 47      |
| 2. Kisi-Kisi Instrumen.....                                                | 50      |
| 3. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil Instrumen .....  | 52      |
| 4. Nilai <i>Cronbach Alpha</i> Instrumen .....                             | 53      |
| 5. Tingkat Pengembalian Kuesioner .....                                    | 61      |
| 6. Karakteristik Reponden Berdasarkan Umur .....                           | 62      |
| 7. Karakteristik Reponden Berdasarkan Jenis Kelamin.....                   | 62      |
| 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....            | 63      |
| 9. Distribusi Frekuensi Kejelasan Tujuan .....                             | 64      |
| 10. Distribusi Frekuensi Dukungan Atasan .....                             | 65      |
| 11. Distribusi Frekuensi Kegunaan SAKD.....                                | 66      |
| 12. Statistik Deskriptif.....                                              | 67      |
| 13. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil Instrumen ..... | 69      |
| 14. Nilai <i>Cronbach Alpha</i> Instrumen .....                            | 69      |
| 15. Uji Normalitas .....                                                   | 71      |
| 16. Uji Multikolonieritas .....                                            | 72      |
| 17. Uji Heterokedastisitas .....                                           | 73      |
| 18. Uji F.....                                                             | 74      |
| 19. Uji Koefisien Determinan .....                                         | 74      |
| 20. Koefisien Regresi .....                                                | 75      |

## DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran                  | Hal |
|---------------------------|-----|
| 1. Tabulasi Data.....     | 89  |
| 2. Hasil Olahan Data..... | 98  |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang *power share* pada setiap level pemerintahan, serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah. Dengan pemberian otonomi daerah pada Kabupaten dan Kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola sistem dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Adanya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut. Oleh karena itu sistem akuntansi menjadi tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap pemerintah daerah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai laporan keuangan tersebut. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Dengan bergulirnya otonomi daerah sejak 1 Januari 2001, tuntutan akan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas begitu sering ditujukan kepada Pemerintah Daerah atas laporan pertanggungjawaban yang dibuatnya berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran cerdas melalui inovasi sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan serangkaian aktivitas yang dimulai dari aktivitas pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh organisasi dalam periode tertentu. (Nordiawan : 2008).

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 yang kini telah diperbaharui oleh Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau

menggunakan aplikasi komputer. Proses akuntansi tersebut didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa sistem akuntansi sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan di daerah.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sangat diperlukan guna menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan (*General Purposes Financial Statements*), karena sistem akuntansi keuangan daerah memberikan landasan tentang prosedur, teknik, dan metode yang layak untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan Pemerintah Daerah.

Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meliputi: Validitas, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi. Reliabilitas, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat dipercaya. Efisien, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat menghemat penggunaan biaya dan kegunaan SAKD selanjutnya adalah Efektif, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal. Pada organisasi pemerintah daerah, sistem akuntansi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD selaku entitas akuntansi akan melaksanakan sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas. Sistem akuntansi keuangan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip

pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang digunakan pada saat sekarang ini adalah sistem akuntansi yang mengacu pada kebijakan perundangan yaitu Permendagri No. 13/2006 yang kemudian direvisi pada Permendagri No.59/2007 dan direvisi kembali pada Permendagri No.21/2011. Suatu keberhasilan penerapan sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan penerapan suatu sistem (Bodnar dan Hopwood : 2003). Agar dapat meningkatkan kegunaan SAKD ini maka perlu adanya faktor perilaku dalam suatu organisasi yang mendukung dalam penerapan SAKD tersebut (Latifah : 2007), diantaranya adalah kejelasan tujuan suatu organisasi serta adanya dukungan atasan dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah agar dapat meningkatkan kegunaan SAKD tersebut dalam memenuhi tuntutan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas lembaga sektor publik.

Menurut Robbins (2003) perilaku organisasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Penerapan SAKD merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kejelasan tujuan dalam organisasi pemerintah dapat terlihat dari visi dan misi organisasi terkait. Apabila kejelasan tujuan organisasi yang berupa pelaksanaan

SAKD tidak dijalankan secara tepat dan didukung secara aktif oleh atasan, maka penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak akan berguna karena kejelasan tujuan memperlihatkan transparansi di dalam sebuah organisasi, yang memperlihatkan alur yang harus dilalui atau dicapai seluruh anggota organisasi dalam bekerja. Kejelasan tujuan memperlihatkan keseriusan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Kejelasan tujuan juga merupakan suatu teknik yang ampuh untuk memotivasi karyawan. Apabila kejelasan tujuan tidak digunakan secara tepat dan tidak didukung secara aktif oleh atasan, maka kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah tidak terwujud secara efektif, sehingga kejelasan tujuan disuatu instansi pemerintahan tidak akan dapat meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan instansi.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (2001) dalam Abdullah (2005) menyatakan bahwa arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya memuat informasi mengenai tujuan (*goals*) dan sasaran (*objectives*) yang akan dicapai oleh daerah yang bersangkutan dalam tahun anggaran tertentu. Kedua komponen arah dan kebijakan umum APBD ini merupakan jawaban atas “*where do we want to be*” dalam proses perencanaan strategis. Tujuan merupakan arah yang akan menunjukkan tujuan daerah dimasa yang akan datang, sedangkan sasaran menunjukkan batas-batas sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Menurut Abdullah (2005) tujuan dan sasaran APBD tersebut harus disesuaikan dengan lima kriteria berikut: spesifik, artinya sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus dapat memberikan inspirasi kepada unit

kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya. Terukur, artinya sasaran harus dinyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya. Menantang tapi realistis, artinya sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai. Berorientasi pada hasil akhir, artinya sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang akan dicapai. Memiliki batas waktu, artinya sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai. Menurut Shield (1995) dalam Latifah (2007) mengatakan bahwa kejelasan tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem, karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, target yang jelas dan paham bagaimana mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki, apabila individu merasakan adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan tujuan diimplementasikan sistem, mereka akan ragu-ragu dalam menjalankan tugas yang diembannya

Dalam penelitian Risna (2012) pengaruh faktor berperilaku organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Menunjukkan hasil bahwa kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Riyanita (2012) tentang pengaruh pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah pada kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa hanya kejelasan tujuan yang berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Faktor perilaku selanjutnya dalam meningkatkan kegunaan dari penerapan SAKD adalah adanya dukungan atasan dalam organisasi. Dukungan atasan sangat penting dalam penerapan suatu sistem, terutama dalam situasi inovasi dikarenakan adanya kekuasaan atasan terkait sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam penerapan sistem baru. Dukungan atasan memiliki pengaruh yang positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, jika di suatu instansi pemerintahan tidak adanya dukungan atasan maka sistem yang akan dikembangkan tidak akan sesuai dengan rencana perusahaan dan dengan demikian tujuan instansi pemerintahan tidak akan tercapai.

Menurut Dessler (2008) sebuah organisasi dapat dikatakan solid bila terjadi hubungan dinamis antara karyawan dengan karyawan lain, serta hubungan yang harmonis antara karyawan dengan atasan. Menurut Shield (1995) dukungan manajemen puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Atasan dapat fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan, dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam implementasi, apabila manajer (atasan) tidak mendukung diimplementasikan sistem baru, maka sumber daya yang diperlukan untuk proses implementasi tidak disediakan, bahkan manajer (atasan) dapat mempengaruhi bawahan untuk berkoalisi menolak sistem baru tersebut.

Dalam penelitian Latifah (2007) tentang faktor keperilakuan organisasi dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa hanya dukungan atasan yang berpengaruh untuk meningkatkan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sedangkan dua faktor keperilakuan lainnya yaitu pelatihan dan kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berhasil dibuktikan karena tidak mencapai tingkat signifikansi. Penelitian yang sama, dilakukan oleh Nurlaela (2010) hasil penelitiannya menunjukkan hubungan positif antara dukungan atasan dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Penelitian yang dilakukan Hidayat (2008) tentang Analisis Implikasi Ketidakesuain Rancangan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKPD), hasil menunjukkan bahwa sebanyak 38 temuan yang mengindikasikan perbedaan antara aturan (format standar) yang berlaku yaitu PP No.58 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006, dikarenakan belum menggunakan Struktur Organisasi baru yang sesuai PP No.58 Tahun 2005, PP No.47 Tahun 2006 dan Permendagri No.13 Tahun 2006 yang saat ini telah direvisi dengan Permendagri No.21 Tahun 2011. Agar sistem akuntansi keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik maka kedua faktor keprilaku yaitu dukungan atasan dan kejelasan tujuan haruslah dipertimbangkan. Hal ini penting diteliti mengingat jika disuatu instansi pemerintah tidak terdapat dukungan atasan dan tidak adanya kejelasan tujuan akan mengakibatkan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berguna.

Setiap tahun terdapat tendensi memburuk dalam kualitas pengelolaan dan laporan keuangan di daerah-daerah di Indonesia secara umum. Data terakhir (2009) menunjukkan, hanya ada 21 daerah yang memiliki status laporan wajar tanpa pengecualian, selebihnya: 249 daerah wajar dengan pengecualian, 7 daerah berstatus *disclaimer* (tak memberikan pendapat) dan 10 daerah *adverse* (tak wajar). ([www.rajawaligarudapancasila.blogspot.com](http://www.rajawaligarudapancasila.blogspot.com))

Sementara untuk di pemerintah Kota Padang tahun 2011 memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Dalam laporan hasil pemeriksaan yang ditandatangani penanggungjawab pemeriksaan BPK RI perwakilan Sumbar Teguh Prasetyo bernomor 10.A/LHP/XVIII.PDG/06/2012 tanggal 19 Juni 2012, terdapat 18 temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan temuan tersebut diantaranya pengelolaan PAD pada lima SKPD (Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Pasar), tidak memadai.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nurlaela (2010) yang meneliti mengenai faktor keperilakuan organisasi seperti: Pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di SUBOSUKAWONOSRATEN dengan menggunakan konflik kognitif dan konflik afektif sebagai variabel intervening. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya. Pertama, dengan objek dan lingkungan yang berbeda dimungkinkan akan menunjukkan hasil yang berbeda pula. Kedua, penelitian ini melihat pengaruh kejelasan tujuan dan dukungan atasan secara langsung terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, sedangkan pada penelitian

sebelumnya melihat pengaruh secara tidak langsung dengan menggunakan variabel intervening.

Peneliti mengambil sampel pada pemerintah Kota Padang karena penerapan prinsip-prinsip kelola keuangan sesuai sistem akuntansi yang ditetapkan oleh UU dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah di Kota Padang masih berjalan belum baik. Hal ini dikarenakan masih adanya dinas-dinas yang terlambat dalam penyusunan laporan keuangan daerahnya pada periode pelaporannya dan pada pengelolaan PAD masih banyak yang tidak memadai. Selanjutnya, menurut Wakil Wali Kota Pemko Padang, Mahyeldi menyatakan bahwa masih adanya beberapa catatan yang perlu diperbaiki salah satunya masalah pencatatan asset ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)). Pencatatan asset harus sesuai dengan SAP dan peraturan-peraturan yang ditetapkan agar penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan dalam meningkatkan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini lebih lanjut pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kota Padang, dengan judul **“Pengaruh Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari latar belakang, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kejelasan tujuan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) ?
2. Apakah dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris tentang:

1. Pengaruh kejelasan tujuan terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
2. Pengaruh dukungan atasan terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak Akademisi dapat memberikan kontribusi dalam menambah literature mengenai Faktor Perilaku Organisasi yang meliputi Kejelasan tujuan dan Dukungan atasan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

## 2. Bagi Praktisi

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang transparan dan akuntabel

## 3. Bagi Riset Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian sejenis.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS**

#### **A. KAJIAN TEORI**

##### **1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)**

###### **a. Pengertian SAKD**

###### **1) Sistem**

Midjan dan Azhar (2001) mendefinisikan, “Sistem sebagai kumpulan *group* dari bagian/komponen apapun baik fisik ataupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”. Menurut Mulyadi (2001) “Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu” dan ia mengungkapkan bahwa, “Dalam organisasi buatan manusia, sistem diciptakan untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau secara rutin terjadi”.

Sedangkan menurut Abdul Kadir (2003) mendefinisikan sistem sebagai sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Jika dalam sebuah sistem terdapat elemen yang tidak memberikan manfaat dalam mencapai tujuan yang sama, maka elemen tersebut dapat dipastikan bukanlah bagian dari sistem. Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan dari berbagai unsur dimana terdapat hubungan yang erat diantara unsur-unsur tersebut dalam mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan.

## **2) Sistem Akuntansi**

“Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan organisasi” (Mulyadi : 2001). Neuner dalam Midjan dan Azhar (2001) mengemukakan bahwa, sistem akuntansi adalah organisasi dari formulir-formulir, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang terkoordinir untuk mempermudah mengelola organisasi dengan menentukan informasi dasar tertentu yang ditentukan.

Alam (2004) mendefinisikan sistem akuntansi sebagai berikut, sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan, serta pelaporan data keuangan. Akuntansi dalam hal ini harus menciptakan suatu cara sedemikian rupa sehingga mempermudah pengendalian internal dan menciptakan arus laporan yang tepat untuk kepentingan manajemen, dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan organisasi formulir dan berbagai catatan transaksi yang mana digunakan untuk keperluan penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pengelolaan manajemen.

## **3) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan

organisasi pemerintah. Sementara itu dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Bastian (2007) memandang sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah proses atau prosedur baik itu dengan menggunakan metode manual ataupun secara terkomputerisasi. Prosedur yang dimaksud dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah. Sedangkan menurut Nordiawan (2008), mendefinisikan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut: “Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”. Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa SAKD merupakan suatu prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan juga untuk pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan daerah.

## **b. Prosedur Akuntansi**

### **1) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas**

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau SKPKD.

- a) **Fungsi terkait:** Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
- b) **Dokumen yang digunakan.** Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dan/atau SKPKD terdiri atas:
  - i. Surat ketetapan pajak daerah, digunakan untuk menetapkan pajak daerah atas wajib pajak yang dibuat oleh PPKD.
  - ii. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), digunakan untuk menetapkan retribusi daerah atas wajib retribusi yang dibuat oleh pengguna anggaran.
  - iii. Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP), digunakan untuk mencatat setiap penerimaan pembayaran dari pihak ketiga yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan .

- iv. Surat Tanda Setoran (STS), digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD.
  - v. Bukti Transfer, merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah.
  - vi. Nota Kredit Bank, dokumen atau bukti dari Bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas.
  - vii. Buku jurnal penerimaan kas, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan penerimaan kas.
  - viii. Buku besar merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk memposting semua transaksi atas kejadian selain kas dari jurnal pengeluaran kas ke buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
  - ix. Buku besar pembantu, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu.
- c) **Laporan yang dihasilkan**
- i. Laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
    - b. Neraca
    - c. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
  - ii. Laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD terdiri atas:
    - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
    - b. Neraca
    - c. Laporan Arus Kas
    - d. Catatan atas Laporan keuangan (CALK)
- d) **Uraian prosedur**
- i. Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
  - ii. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas, disertai rekening lawan asal penerimaan kas tersebut.
  - iii. Bukti – bukti transaksi penerimaan kas mencakup antara lain:
    - a. Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP)
    - b. Surat Tanda Setoran (STS)
    - c. Bukti transfer
    - d. Nota kredit

- e. Bukti penerimaan lainnya
- iv. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik atau berkala melakukan posting ke buku besar.
- v. Jika dianggap perlu, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD dapat membuat buku besar pembantu yang berfungsi sebagai rincian buku besar dan berlaku sebagai kontrol.
- vi. Pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas, buku besar, dan buku besar pembantu dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
- vii. Pada akhir periode, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD menyusun laporan keuangan.

## **2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas**

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD.

- a) **Fungsi terkait** : Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
- b) **Dokumen yang digunakan** : Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD terdiri atas:
- i. Surat Penyediaan Dana (SPD), merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersediannya dana untuk diserap/ direalisasi.
  - ii. Surat Perintah Membayar (SPM), merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan Surat Perintah pencairan dana (SP2D) yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD.
  - iii. Kwitansi pembayaran dan bukti pembayaran lainnya, merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran.
  - iv. SP2D merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BUD atau Kuasa BUD untuk mencairkan uang pada bank yang telah ditunjuk.
  - v. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah.

- vi. Nota Debit Bank, merupakan dokumen , atas bukti dari Bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah.
- vii. Buku jurnal pengeluaran kas, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan pengeluaran kas.
- viii. Buku besar merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk memposting semua transaksi atau kejadian selain kas dari jurnal pengeluaran kas ke buku besar untuk setiap rekening aset , kewajiban, ekuitas, dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- ix. Buku besar pembantu, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu.

**c). Laporan yang dihasilkan**

- i. Laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD terdiri atas:
  - a. Laporan Realisasi anggaran (LRA)
  - b. Neraca
  - c. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

ii. Laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi pengeluaran

kas pada SKPKD terdiri atas :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca
- c. Laporan arus kas
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

**d). Uraian Prosedur**

- i. Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
- ii. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas, disertai rekening lawan asal pengeluaran kas tersebut.
- iii. Bukti transaksi penerimaan kas mencakup antara lain:
  - a. SP2D
  - b. Bukti transfer
  - c. Nota Kredit
  - d. Bukti penerimaan lainnya
- iv. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik atau berkala melakukan posting ke buku besar.

- v. Jika dianggap perlu, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD dapat membuat buku besar pembantu yang berfungsi sebagai rincian buku besar dan berlaku sebagai kontrol.
- vi. Pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
- vii. Pada akhir periode, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD menyusun laporan keuangan.

### 3). **Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah**

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, sehingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD. Prosedur akuntansi digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang digunakan / dikuasai SKPD dan/atau SKPKD.

- a) **Fungsi terkait :** Fungsi terkait yang dalam prosedur akuntansi aset pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
- b) **Dokumen yang digunakan**

- i. Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset pada SKPD terdiri atas :
  - a. Berita acara penerimaan barang
  - b. Berita acara serah terima barang
  - c. Berita acara penyelesaian pekerjaan
  - d. Bukti memorial, merupakan dokumen yang memuat informasi mengenai jenis/ nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi, aset tetap, nilai aset tetap, dan tanggal transaksi dan/atau kejadian sebagai dasar pencatatan ke dalam buku jurnal umum.
  - e. Buku jurnal umum, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi dan/atau kejadian yang berhubungan dengan aset.
  - f. Buku besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD untuk memosting semua transaksi dan/atau kejadian dari buku jurnal umum ke buku besar untuk setiap rekening aset , kewajiban, ekuitas dana, pendapatan , belanja, dan pembiayaan.
  - g. Buku besar pembantu, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu.

ii. Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset pada SKPKD terdiri atas:

- a. Berita acara penerimaan barang
- b. Surat keputusan penghapusan barang
- c. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD)
- d. Berita acara pemusnahan barang
- e. Berita acara serah terima barang
- f. Berita acara penilaian
- g. Berita acara penyelesaian pekerjaan
- h. Bukti memorial, merupakan dokumen yang memuat informasi mengenai jenis/ nama aset tetap , kode rekening , klasifikasi , aset tetap, nilai aset tetap, dan tanggal transaksi dan/atau kejadian sebagai dasar pencatatan ke dalam buku jurnal umum.
- i. Buku jurnal umum, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi dan/atau kejadian yang berhubungan dengan aset.
- j. Buku besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD untuk memposting semua transaksi dan/atau kejadian dari buku jurnal umum ke buku besar untuk setiap rekening aset , kewajiban, ekuitas dana, pendapatan , belanja, dan pembiayaan

- k. Buku besar pembantu, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu.

**c) Laporan yang dihasilkan**

- i. Laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi selain kas pada SKPD terdiri atas :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - b. Neraca
  - c. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
- ii. Laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD terdiri atas :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - b. Neraca
  - c. Laporan Arus Kas
  - d. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

**d). Uraian prosedur**

- i. Prosedur akuntansi aset pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD serta pejabat, pengurus, dan penyimpanan barang, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD
- ii. Bukti transaksi dan / atau kejadian akuntansi

- iii. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian melakukan pencatatan ke bukti memorial.
- iv. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti memorial mencatat ke dalam buku jurnal umum.
- v. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik melakukan posting ke buku besar.
- vi. Setiap akhir periode, semua buku besar di tutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD dan/atau SKPKD.

#### **4). Prosedur Akuntansi Selain Kas**

Prosedur akuntansi selain kas adalah meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan /atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan/atau SKPD. Menurut Permendagri No.13 tahun 2006 dan perubahannya No.59 Tahun 2007, prosedur akuntansi selain kas meliputi transaksi dan/atau kejadian yang berupa:

- a) Pengesahan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dana yang merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang/ tambahan.
- b) Koreksi kesalahan pencatatan yang merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal yang telah diposting ke buku besar.

- c) Penerimaan hibah selain kas yang merupakan penerimaan sumber ekonomi non kas yang bukan merupakan pelaksanaan APBD, tetapi mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemda.
- d) Pembelian secara kredit yang merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang.
- e) Retur pembelian kredit yang merupakan pengembalian aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas yang merupakan pemindahtanganan aset tetap kepada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.
- f) Penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas yang merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (ruislaag) dengan pihak ketiga.
  - i. **Fungsi terkait :** Fungsi terkait dalam prosedur akuntansi selain kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
  - ii. **Dokumen yang digunakan :** Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas pada SKPD dan/atau SKPKD terdiri atas
    - a. Berita acara penerimaan barang
    - b. Surat keputusan penghapusan barang
    - c. Surat keputusan mutasi barang
    - d. Berita acara pemusnahan barang
    - e. Berita acara serah terima barang

- f. Berita acara penilaian
- g. Bukti memorial
- h. Buku jurnal umum
- i. Buku besar
- j. Buku besar pembantu

**iii. Laporan yang dihasilkan**

- a. Laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi selain kas pada SKPD terdiri atas :
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 2) Neraca
  - 3) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
- b. Laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD terdiri atas :
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 2) Neraca
  - 3) Laporan Arus Kas
  - 4) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

**iv. Uraian Prosedur**

- a. Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
- b. Transaksi dan / atau kejadian selain kas antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengesahan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dana.
  - 2) Koreksi kesalahan pencatatan
  - 3) Penerimaan hibah/donasi selain kas
  - 4) Pembelian secara kredit
  - 5) Retur pembelian kredit
  - 6) Pelepasan hak atas aset/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas.
  - 7) Penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas.
- c. Bukti transaksi dan/atau kejadian selain kas antara lain:
- 1) Berita acara penerimaan barang
  - 2) Surat keputusan penghapusan barang
  - 3) Surat pengiriman barang
  - 4) Surat keputusan mutasi barang
  - 5) Berita acara pemusnahan barang
  - 6) Berita acara serah terima barang
  - 7) Berita acara penilaian barang
- d. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian melakukan pencatatan bukti memorial.
- e. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti memorial mencatat ke dalam buku jurnal umum.

- f. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik melakukan posting ke buku besar.
- g. Jika dianggap perlu, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD dapat membuat buku besar pembantu yang berfungsi sebagai rincian buku besar dan kontrol.
- h. Pencatatan ke dalam buku jurnal umum dan buku besar pembantu dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **c. Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang disebut Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Dedi Nurdiawan (2008) memiliki tiga tujuan pokok yaitu:

#### **1) Pertanggungjawaban**

Akuntansi pemerintah harus memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab pada operasi unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban tersebut mengandung implikasi bahwa akuntansi pemerintahan seharusnya menyediakan informasi tentang berbagai tindakan pemerintah selama periode bersangkutan.

## 2) Manajerial

Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah. Tujuan manajerial ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintahan tingkat atas dan menengah dapat mengandalkan informasi keuangan atas pelaksanaan sebelumnya untuk membuat keputusan atau menyusun perencanaan masa yang akan datang.

## 3) Pengawasan

Akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

### **d. Karakteristik Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

SAKD atau sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki beberapa karakteristik (Nordiawan : 2008)

## 1) Basis akuntansi

Dalam hal ini, sistem akuntansi pemerintah menggunakan dua basis akuntansi, yaitu basis kas untuk LRA dan basis akrual untuk neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah. Asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.

## 2) Sistem pembukuan

Sistem pembukuan pada pemerintah menggunakan sistem pembukuan berpasangan (*Double entry system*). Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit suatu perkiraan yang lain. Menurut permendagri No. 59 tahun 2007 mengenai akuntansi keuangan daerah, dimana sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur pengeluaran kas, prosedur pengelolaan asset tetap/barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas.

### e. Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2004), SAKD dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Selanjutnya menurut Halim (2002), implementasi sistem akuntansi di daerah bisa dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

#### 1) Untuk kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri

Penerapan sistem informasi keuangan daerah harus lebih ditekankan pada pencapaian visi dan misi dari daerah itu sendiri. Untuk menyediakan segala kebutuhan informasi keuangan di daerah yang baik perlu di dukung oleh seperangkat computer dengan segala pendukungnya.

#### 2) Untuk kebutuhan pemerintah yang lebih tinggi

Disamping untuk kebutuhan daerah, masing-masing sistem informasi diharapkan juga dapat memberikan data mengenai daerahnya kepada pemerintah pusat dengan cepat, akurat dan up to date. Sehingga tugas pemerintah pusat sebagai pengendali akan lebih mudah menjalankannya.

- 3) Untuk kepentingan masyarakat umum sebagai bagian dari transparansi penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Adapun penerapan dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini diharapkan dapat berguna untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (SAP : 2005). Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada ketaatannya pada peraturan perundangan (SAP : 2005)

Indikator yang digunakan dalam mengukur kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut diadopsi dari Nurlaela (2010) adalah sebagai berikut:

- a) *Validity*, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi
- b) *Reliability*, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat dipercaya

- c) Efisien, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat menghemat penggunaan biaya
- d) Efektif, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal

## **2. Kejelasan Tujuan**

Tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan dari anggota organisasi yang dominan, yang secara kolektif mempunyai kendali yang mencukupi atas sumber daya organisasi untuk membuat komitmen atas arah tertentu. Tujuan dipandang sebagai suatu kesepakatan yang kompleks, yang kadang kala mencerminkan kebutuhan individual dan tujuan pribadi yang saling bertentangan dari anggota organisasi yang dominan. Menurut Gibson (1993) dalam Latifah (2007), tujuan merupakan apa yang ingin dicapai oleh seseorang atau organisasi. Kejelasan tujuan dalam suatu organisasi dapat menentukan suatu keberhasilan sistem, karena individu dengan suatu kejelasan tujuan akan lebih dapat memahami bagaimana cara mereka dalam mencapai target untuk mencapai tujuan dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki.

Menurut Robbins (2003) kejelasan tujuan dalam organisasi dapat terlihat dari visi dan misi organisasi terkait. Kegunaan SAKD merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Apabila kejelasan tujuan yang berupa pelaksanaan SAKD tidak dijalankan secara tepat maka kegunaan dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak akan terwujud. Disamping itu, kejelasan

tujuan juga merupakan suatu teknik yang ampuh untuk memotivasi karyawan apabila kejelasan tujuan dapat digunakan secara tepat, dimonitor secara hati-hati dan didukung secara aktif oleh atasan, maka kejelasan tujuan dapat meningkatkan hasil dan tujuan yang diinginkan. Menurut Gibson(1993) dalam Latifah (2007) ada beberapa langkah dalam menetapkan suatu kejelasan tujuan, diantaranya:

- 1) Diagnose bagi kesiap siagaan, maksudnya untuk menentukan apakah orang, organisasi, dan teknologi sudah cocok untuk menetapkan tujuan
- 2) Mempersiapkan karyawan dengan adanya interaksi interpersonal, komunikasi, dan rencana bagi kejelasan tujuan
- 3) Menekankan sifat-sifat dalam tujuan yang harus dimengerti atasan dan bawahan
- 4) Melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengadakan penyesuaian yang perlu dalam tujuan yang telah ditetapkan
- 5) Melaksanakan pemeriksaan akhir untuk mengecek tujuan yang telah ditetapkan

Gibson (2005) tujuan merupakan sasaran yang hendak dicapai atau diprioritaskan sebuah organisasi. Tujuan merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam bekerja. Tujuan yang jelas dan transparan akan memberikan sebuah target bagi masing-masing anggota organisasi untuk segera dicapai. Menurut Robbins (2005) sebuah organisasi harus memiliki tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan akan membuat keteraturan di dalam perusahaan. Kejelasan tujuan akan mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan. Apabila kejelasan tujuan tidak digunakan secara tepat dan

didukung secara aktif oleh atasan, maka kegunaan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak akan terwujud, sehingga kejelasan tujuan disuatu instansi pemerintahan tidak akan dapat meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan instansi.

Menurut Handoko (2001) kejelasan tujuan memperlihatkan transparansi di dalam sebuah organisasi, yang memperlihatkan alur yang harus dilalui atau dicapai seluruh anggota organisasi dalam bekerja. Kejelasan tujuan memperlihatkan keseriusan organisasi dalam mencapai visi demi terjaganya eksistensi organisasi dimasa depan. Untuk mengukur kejelasan tujuan maka digunakan indikator yang diadopsi dari Nurlaela (2010) yaitu sebagai berikut:

- a) Transparansi sasaran yaitu keterbukaan di dalam perusahaan kepada setiap anggota organisasi tentang adanya sebuah tujuan yang harus dicapai
- b) Perencanaan yaitu rangkaian kegiatan atau prosedur yang dapat dilakukan karyawan dalam mencapai tujuan
- c) Target yaitu standar sasaran yang dibebankan kepada masing-masing anggota organisasi
- d) Pengawasan yaitu proses pengamatan yang dilakukan manajemen terhadap anggota organisasi dalam mencapai tujuan
- e) Sanksi yaitu hukuman yang diberikan kepada karyawan yang tidak bekerja sesuai dengan prosedur atau standar yang diharuskan perusahaan.

### **3. Dukungan Atasan**

Menurut Nasution (1994) dalam Latifah (2007), dukungan atasan dapat diartikan sebagai keterlibatan atasan dalam kemajuan proyek dan menyediakan

sumber daya yang diperlukan. Atasan dapat focus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam implementasi. Ciri-ciri atasan yang baik dapat memberikan dukungan kepada karyawannya dalam suatu organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai kemampuan melebihi orang lain dan harus mempunyai inisiatif untuk memberikan masukan yang baik pada karyawannya
- 2) Mempunyai rasa tanggung jawab yang besar
- 3) Mau bekerja keras sehingga dapat memberikan contoh atau motivasi pada karyawannya
- 4) Pandai bergaul dan dapat mengenal semua karyawannya dengan baik
- 5) Memiliki rasa integritas dan rasa bersatu padu dengan kelompok yang ada dalam organisasi

Atasan memegang peranan penting dalam setiap tahap siklus pengembangan sistem (*system development life cycle*) yang meliputi perencanaan, perancangan, dan implementasi. Dukungan atasan meliputi penyusunan sasaran dan penilaian tujuan, mengevaluasi usulan proyek pengembangan sistem informasi, mendefinisikan informasi dan pemrosesan yang dibutuhkan, melakukan review program dan rencana pengembangan sistem.

Menurut Ikhsan (2005), dukungan manajemen puncak/atasan merupakan suatu factor penting yang menentukan efektifitas penerimaan sistem informasi dalam organisasi. Beberapa alasan mengapa keterlibatan manajemen puncak dalam pengembangan sistem merupakan hal yang penting, yaitu: Pengembangan

sistem merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan. Manajemen puncak (atasan) mengetahui rencana perusahaan sehingga sistem yang dikembangkan seharusnya sesuai dengan rencana perusahaan dan dengan demikian sistem yang baru akan mendorong tercapainya tujuan perusahaan. Beberapa alasan mengapa keterlibatan manajemen puncak (atasan) dalam pengembangan sistem informasi merupakan hal yang penting, yaitu:

- a) Manajemen puncak (atasan) merupakan focus utama dalam proyek pengembangan sistem
- b) Manajemen puncak menjamin penekanan tujuan perusahaan dari pada aspek teknisnya
- c) Pemilihan sistem yang akan dikembangkan didasarkan pada kemungkinan manfaat yang diperoleh dan manajemen puncak mampu menginterpretasikan hal tersebut.
- d) Keterlibatan manajemen puncak akan memberikan kegunaan dan pembuatan keputusan yang lebih baik dalam pengembangan sistem

Dukungan atasan sangat penting dalam meningkatkan kegunaan dari penerapan suatu sistem, terutama dalam situasi inovasi dikarenakan adanya kekuasaan atasan terkait sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam penerapan sistem baru. Dukungan atasan memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan kegunaan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, jika di suatu instansi pemerintahan tidak adanya dukungan atasan maka sistem yang akan

dikembangkan tidak akan sesuai dengan rencana instansi dan dengan demikian tujuan instansi pemerintahan tidak akan tercapai.

Menurut Shield (1989) dukungan atasan dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan atasan terkait dengan sumber daya. Atasan dapat fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan, dan inisitif strategi yang direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam implementasi. Menurut Dessler (2008) sebuah organisasi dapat dikatakan solid bila terjadi hubungan dinamis antara karyawan dengan karyawan lain, serta hubungan yang harmonis antara karyawan dengan atasan. Kegiatan atau perilaku bekerja yang saling mendukung antara satu dengan yang lain akan membentuk kerja sama tim yang solid sehingga tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dapat direalisasikan dengan baik. Untuk mengukur dukungan atasan maka digunakan indicator yang diadopsi dari Nurlaela (2010) yaitu sebagai berikut:

- i. Partisipasi atasan dalam bekerja, merupakan tindakan nyata dari atasan yang ikut bekerja bersama sama anggota organisasi lainnya.
- ii. Motivator yaitu mendorong bawahannya untuk dapat mencapai sasaran yang telah disepakati
- iii. Reward yaitu penghargaan yang diberikan atasan ketika bawahannya dapat mencapai sasaran atau target yang direncanakan

## **B. PENELITIAN YANG RELEVAN**

Penelitian Latifah (2007) tentang faktor keperilakuan organisasi yang meliputi pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan dalam implementasi

sistem akuntansi keuangan daerah, pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa hanya dukungan atasan yang berpengaruh positif untuk meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Sedangkan dua faktor berperilaku lainnya yaitu pelatihan dan kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berhasil dibuktikan karena tidak mencapai tingkat signifikansi.

Penelitian yang sama, dilakukan oleh Nurlaela (2010) pada Pemerintah daerah Subosukawonosraten. Hasil penelitiannya menunjukkan hubungan positif antara dukungan atasan dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan dari hubungan negatif antara pelatihan dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hal yang sama juga dilihat dari hasil pengujian kejelasan tujuan dengan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, karena nilai critical ratio (CR) menunjukkan nilai yang negatif.

Penelitian oleh Riyanita (2012) tentang pengaruh pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah pada kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa hanya kejelasan tujuan yang berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian oleh Yuliana (2012) tentang faktor berperilaku organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah pada Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa hanya kejelasan tujuan yang berpengaruh signifikan positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

### **C. HUBUNGAN ANTAR VARIABEL**

#### **1. Hubungan Antara Kejelasan Tujuan Terhadap Kegunaan SAKD**

Menurut Robbins (2003) kejelasan tujuan dalam organisasi pemerintah dapat terlihat dari visi dan misi organisasi terkait. Penerapan SAKD merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Apabila kejelasan tujuan yang berupa pelaksanaan SAKD tidak dijalankan secara tepat maka keberhasilan dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak akan terjadi, sebuah organisasi harus memiliki tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan akan membuat keteraturan di dalam organisasi. Kejelasan tujuan akan mendorong organisasi untuk melakukan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan. Melalui kejelasan tujuan tentu karyawan dapat lebih fokus dalam bekerja mencapai target sesuai dengan standar operasional kerja yang dimiliki organisasi.

Menurut Handoko (2001) kejelasan tujuan memperlihatkan transparansi informasi di dalam sebuah organisasi, yang memperlihatkan alur yang harus dilalui atau dicapai seluruh anggota organisasi dalam bekerja, kejelasan tujuan akan memperlihatkan keseriusan organisasi dalam mencapai visi demi terjaganya eksistensi organisasi dimasa depan. Dalam penelitian Risna (2012) pengaruh faktor berperilaku organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Menunjukkan hasil kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Kejelasan tujuan sangat berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, karena kejelasan tujuan merupakan teknik yang ampuh untuk memotivasi karyawan dan

apabila kejelasan tujuan tidak digunakan secara tepat dan didukung secara aktif oleh atasan, maka kegunaan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak akan terwujud, sehingga kejelasan tujuan di suatu instansi pemerintahan tidak akan dapat meningkatkan hasil dalam mencapai tujuan instansi. Jadi jika kejelasan tujuan semakin jelas maka kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah semakin meningkat.

## **2. Hubungan Antara Dukungan Atasan Terhadap Penerapan SAKD**

Dukungan atasan juga berpengaruh dalam mendukung suksesnya implementasi sistem baru. Menurut Shield (1995) dukungan manajemen puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Manajer (atasan) dapat focus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila manajer (atasan) mendukung sepenuhnya dalam implementasi. Menurut McLeod (2005) di dalam pengembangan sistem atau teknologi berbasis informasi sangat diperlukan kegiatan organisasi yang saling mendukung antara karyawan dengan sesama karyawan maupun karyawan dengan atasan serta dibantu oleh tenaga profesional atau ahli. Melalui kegiatan atau tindakan yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya akan memberikan dampak positif bagi kegunaan dari penerapan dan pemanfaatan sistem.

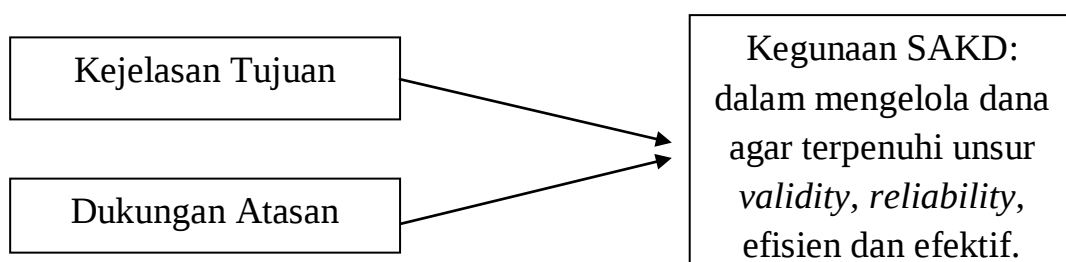
Dalam penelitian Latifah (2007) pengaruh faktor berperilaku organisasi yang meliputi pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, menunjukkan hasil dukungan atasan berpengaruh positif. Dalam penelitian Nurdin (2011) pengaruh

faktor berperilaku organisasi terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Menunjukkan hasil dukungan atasan juga berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, semakin besar dukungan atasan semakin meningkatkan kegunaan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam lingkungan pemerintah daerah.

Dukungan atasan memegang peranan penting dalam setiap tahap siklus pengembangan sistem dan dengan adanya dukungan atasan berarti atasan terlibat secara langsung dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam meningkatkan kegunaan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Jika tidak adanya dukungan atasan maka sistem yang akan dikembangkan tidak akan sesuai dengan rencana perusahaan dan dengan demikian tujuan instansi pemerintah tidak akan tercapai. Jadi semakin aktif atasan memberi dukungan maka kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah juga akan semakin meningkat.

#### D. KERANGKA KONSEPTUAL

Berikut merupakan gambar dari kerangka konseptual Pengaruh kejelasan tujuan, dan dukungan atasan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)



**Gambar 1**  
**Kerangka Konseptual**

## **E. HIPOTESIS**

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> : Kejelasan tujuan berpengaruh signifikan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- H<sub>2</sub> : Dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian Pengaruh Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejelasan Tujuan berpengaruh signifikan positif terhadap Kegunaan SAKD pada Dinas di Pemerintah Kota Padang.
2. Dukungan Atasan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kegunaan SAKD pada Dinas di Pemerintah Kota Padang

#### **B. KETERBATASAN**

Penelitian ini hanya menguji pengaruh faktor perilaku organisasi yang meliputi Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan terhadap kegunaan SAKD, dari hasil uji koefisien determinasi terlihat bahwa pengaruh Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan terhadap kegunaan SAKD hanya sebesar 22,1%, sedangkan 77,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

#### **C. SARAN**

Berdasarkan pada keterbatasan di atas, maka peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti variabel-variabel lain yang mempengaruhi keberhasilan penerapan suatu sistem, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jawad (1997) tentang faktor-faktor yang menentukan kesuksesan implementasi

sistem menunjukan bahwa ada beberapa factor yang berpengaruh seperti faktor teknologi, factor manajemen, factor manusia, dan factor eksternal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Faisal, 2005, I Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Edisi Kedua Cetakan Kelima: Penerbitn Universitas Muhammadiyah
- Alam, S. 2004. *Akuntansi SNA kelas XI*. Jakarta : Erlangga
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. 2010. Opini LKPD di Wilayah Propinsi Sumatera Barat.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Sektor Akuntansi Publik*, Buku 2. Jakarta : Salemba Empat
- Bodnar, G.H & William, S. Hopwood. 2003. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: PT Indeks
- Chenhall, R.H (2004), The Role of Cognitif and Affective Conflict in Early Implementation of Activity-Based Cost Management. ***Behavioral Reaserch in AAccounting***. 16:19
- Dessler garry. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Indonesia. Jakarta: Erlangga
- Gibson, Ivancevist, dan Donnelly. 1993. *Organisasi Perilaku: Struktur dan Proksi Edisi 5*. Jakarta : Erlangga
- Gibson, Ivancevist, dan Donnelly. 2005. *Organisasi Perilaku*. Jakarta : Erlangga
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2003. *Akuntansi dan Pengendalian Daerah*. Yogyakarta : UMP AMP YPKN
- Handoko, Hani. (2001). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi 2. BPFE. Yogyakarta
- Hendriksen, M.C. 2005. *Accounting Theory*, Ed. New Jersey: Person Education, Inc.
- Hidayat, Heri. 2008. *Analisis Implikasi Ketidaksesuaian Rancangan SSistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKPD) Way KAnan dengan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pada*

- Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan*. Thesi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Ikhsan, Arfan dan Ishak Muhammad. 2005. *Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kadir, Abdul. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta:ANDI
- Latifah, Lyna dan Sabeni Arifin. 2007. *Faktor Keperilakuan Organisasi dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Jurnal SNA X : Universitas Diponegoro
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Mnajemen Keuangan Daerah*. ANDI. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta
- Midjan, La dan Azhar Susanto (2001). *Sistem Informasi Akuntansi I*, Bandung: Informatika Akuntansi
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga. Jakarta : Salemba Empat
- Nordiawan, Deddi. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Nuridin, Diana. 2012. *Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Skripsi. Padang : Universitas Bung Hatta
- Nurlaela, Siti dan Rahmawati. 2010. *Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Subosukawonosraten*. Jurnal SNA XIII
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 *tentang Akuntansi Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Puspita, Winda. 2011. *Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada badan Kepegawaian Daerah Kota Padang*. Skripsi. Padang : Universitas Andalas

- Republik Indonesia. Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah Republik Indonesia*
- Republik Indonesia. Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Pusat dan Pemerintah Daerah Republik Indonesia*
- Republik Indonesia. Undang-undang RI No.17 Tahun 2003 *tentang Keuangan negara Republik Indonesia*
- Riyanita, Risya. 2012. *Pengaruh Pelatihan, Kejelasan Tujuan, dan Dukungan Atasan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Skripsi. Padang : Universitas Bung Hatta
- Robbins, P.Stephen. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT Indeks
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Bussiness II*. Jakarta : Salemba Empat
- Shield, M. D., and S.M Young. (1995). *Behavioral Model for Implementing Cost Management System*. Journal of Cost Management (Winter), 17:25
- Suwardjono. 2005. *Perekayasaan Akuntansi Keuangan*. BPFE: Yogyakarta
- Tim Pokja. 2001. *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah* : Jakarta
- Wibisono, Dermawan. 2006. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : Erlangga
- Yuliana, Risna. 2012. *Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Skripsi. Padang : Universitas Bung Hatta